

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Administrasi Pembangunan

2.1.1 Definisi Pembangunan

Definisi pembangunan menurut Nasution (1988:35) disebutkan bahwa pembangunan merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Sedangkan menurut Tjokrowinoto dalam Suryono (2004:21) yang menyimpulkan beberapa definisi pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) yaitu sebagai berikut :

- a. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketataran kehidupan masyarakat yang lebih baik.
- b. Pembangunan sebagai upaya sadar, terencana dan melembaga.
- c. Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free*).
- d. Pembangunan memperoleh sifat dan konsep *trancendental* sebagai *metadiscipliner*, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi yaitu *phenomenon the ideology of developmentalism*.
- e. Pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai (*value loaded*) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara semakin meningkat.
- f. Pembangunan menjadi *culture specific, situation specific and time specific*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar dan berencana untuk menjadikan atau mengerjakan sesuatu hal dengan mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada sehingga berhasil mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan.

Di negara yang sedang berkembang dalam melakukan pembangunan hingga saat ini terdapat tiga jenis strategi yang digunakan yaitu, pertama, strategi pertumbuhan (*growth strategy*) didasarkan pada asumsi efek tetesan kebawah atau *trickle down effect*, pelaksanaan pembangunan di negara sedang berkembang penekanannya pada pendapatan masyarakat dan pertumbuhan pendapatan nasional. Penerapan konsep pertumbuhan dalam melaksanakan pembangunan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan yang sangat pesat namun belum ada aspek pemerataan.

Kedua, strategi kesejahteraan (*welfare strategy*) yang bertitik tolak pada asumsi bahwa merekalah (pemerintah) yang menentukan apa yang perlu bagi masyarakat dan mempunyai dana untuk tujuan itu serta penerapan pembangunan cenderung pelaksanaannya bersifat sentralistik. Sehingga hubungan ketergantungan antara rakyat dengan proyek-proyek pembangunan yang pada akhirnya mengakibatkan tidak adanya proaktif dari masyarakat karena tidak ada partisipasi nyata.

Ketiga, strategi responsif atau partisipatif. Esensi dari strategi responsif adalah keterlibatan masyarakat membuat keputusan-keputusan dalam setiap tahap aktivitas, yaitu materi dari persiapan hingga pelaksanaan dan evaluasi.

2.1.2 Definisi Administrasi Pembangunan

Definisi administrasi pembangunan mencakup dua pengertian yaitu administrasi dan pembangunan. Telah umum diketahui definisi administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah

ditentukan. Sedangkan definisi pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang dilaksanakan oleh suatu bangsa untuk menuju kesejahteraan bangsa.

Menurut Tilaar dalam Suryono (2008:20) definisi pembangunan yaitu pertama, pembangunan bukanlah semata-mata untuk mencapai tujuan dan target pembangunan itu sendiri tetapi pembangunan itu diadakan untuk memperbaiki taraf hidup manusia. Kedua, pembangunan dilaksanakan oleh manusia untuk manusia.

Sehingga dapat disimpulkan definisi administrasi pembangunan adalah seluruh rangkaian usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya (Siagian, 2005:5).

2.1.3 Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan

Pendekatan administrasi pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian administrasi oleh negara untuk mewujudkan pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang dianggap lebih baik didalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Dalam proses tersebut diperlukan tentang ruang lingkup administrasi pembangunan. Ruang lingkup administrasi pembangunan menurut Tjokroamidjodjo (1988:15) yaitu :

- a. Penyempurnaan administrasi negara, meliputi :
 1. Kepemimpinan, koordinasi, pengawasan.
 2. Administrasi fungsional kepegawaian, keuangan dan sarana-saran lain dan perlembagaan dalam arti sempit.
- b. Penyempurnaan administrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, meliputi :

1. Proses perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan. Sering tercermin dalam suatu rencana pembangunan atau suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten (dalam proses administrasi maupun proses politik).
2. Tata pelaksanaannya secara efektif.

2.1.4 Penyelenggaraan Pembangunan

Suatu negara khususnya negara berkembang, melakukan berbagai upaya pembangunan. Pembangunan yang dilakukan mencakup dari berbagai kehidupan. Dalam kaitanya dengan penyelenggaraan pembangunan itulah menurut Nasution (1988:53) ada lima tataran yang harus diketahui, yaitu :

- 1) Pembangunan dalam dirinya mengandung perubahan dalam mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi kini ada.
- 2) Pengertian pembangunan inheren dengan pertumbuhan, yang dimaksud dengan pertumbuhan disini adalah kemampuan suatu negara bangsa untuk terus berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.
- 3) Pembangunan ialah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Artinya keadaan yang lebih baik, yang didambakan masyarakat serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung.
- 4) Jika diterima pendapat bahwa pembangunan merupakan rangkaian usaha yang dilakukan secara sadar, maka pembangunan itu didasarkan pada suatu rencana yang tersusun secara rapi dalam kurun waktu tertentu.
- 5) Pembangunan bermuara pada titik akhir tertentu.

2.1.5 Program Dan Proyek Pembangunan

Output dari pembangunan adalah menghasilkan program-program dan proyek-proyek pembangunan, Gettinger (dalam Bryant dan White, 1987:135) , mengatakan sebagai berikut :

“Bahwa proyek-proyek merupakan sisi tajam pembangunan. Dengan demikian benar bahwa proyek harus erat kaitannya dengan program-program (nasional atau daerah). Program merupakan kumpulan proyek-proyek. Suatu hal yang keliru jika memandang atau merencanakan suatu proyek yang terpisah sama sekali dari program yang mencakup proyek itu sebagai bagiannya.”

Bryant dan White (1987:137) menggaris bawahi pentingnya perspektif ini dengan menyatakan bahwa lebih tepat jika proyek dipandang sebagai ungkapan lokal dari program nasional secara luas dan bukan sebagai kegiatan tersendiri yang lepas proyek dapat dirancang antara lain untuk menyajikan informasi yang menentukan bagi perencanaan program, kemudian dapat untuk menyusun proyek-proyek lain dan dapat dilaksanakan sebagai kegiatan-kegiatan berantai.

Bryant dan White (1987:142) mengatakan ada empat aspek dalam konseptualisasi proyek dan program sebagai bagian dari proses pembangunan yang berinteraksi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Proyek-proyek harus diseleksi dalam hubungan dengan kebutuhan-kebutuhan programnya, proyek harus dirancang untuk mendorong agar program dapat memanfaatkan pelajaran yang ada dan proyek-proyek itu harus dievaluasi antara lain dalam kaitan dengan keefektifannya memacu kemampuan organisasi dalam menanggapi prakarsa-prakarsa lokal.
- 2) Baik organisasi proyek maupun organisasi program haruslah merupakan *learning organization* yang terbuka terhadap umpan balik dari lingkungan, memproses informasi itu dan terus-menerus memperbaharui pendekatan-pendekatan yang ditempuhnya. Merancang suatu proyek agar cocok dengan dengan konteks lingkungannya memerlukan adanya perkiraan sumber-sumber daya, kemungkinan-kemungkinan dan kendala-kendala ekonomi, sosial, budaya dan politik.
- 3) Aspek ketiga menyangkut struktur insentif bagi perilaku dalam suatu proyek. “Apakah perilaku-perilaku yang dirancang oleh insentif-insentif itu selaras dengan tujuan proyek?/ “akankah insentif-insentif itu memotivasi para pemimpin dan staf proyek melakukan hal yang paling kondusif bagi pencapaian tujuan-tujuan proyek?/ “apakah organisasi proyeknya disusun demi mendapatkan serta memproses informasi untuk memaksimalkan pelajaran dari kesalahan maupun keberhasilan?.
- 4) Penting untuk memikirkan dan mengevaluasi efisiensi serta keadilan yang ada dalam proyek itu sendiri, tingkat imbalan investasi dan dampak serta distribusi manfaat-manfaat proyek seperti tercantum dalam usulan seperti yang disampaikan sebelumnya, administrasi pembangunan harus bertanya setelah jangka waktu tertentu, siapa mendapat apa? Evaluasi setelah proyek selesai dilaksanakan akan mengisyaratkan “siapa mendapat seberapa bagian” dari manfaat proyek yang mengalir itu : rancangan yang baik mengenai proyek itu meletakkan dasar bagi evaluasi efektif pada waktu kemudian.

2.1.6 Pembangunan Desa

Wujud pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program dan proyek pembangunan itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, makna pembangunan tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas.

Sasaran pembangunan desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, pengerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan masyarakat (*Empowerment*) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Makna pembangunan desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi itu diartikan tidak saja sebagai keikutsertaan dalam pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar desa (*outsider stakeholder*) atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan program yang masuk ke desanya, akan tetapi lebih dari sekedar itu. Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan didesa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari warga setempat (*local*), sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumberdaya dan pengetahuan yang mereka miliki.

Sejalan dengan itu, segala potensi lokal betapapun kecilnya tidak dapat diabaikan, karena ia akan menjadi sumber dan *entry point* dari sebuah pembangunan. Midgley (1995:78-79) mengemukakan ada beberapa aspek dalam pembangunan desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya intervensi. Dua hal tersebut perlu disoroti karena terkait dengan proses pemberdayaan. Suatu program pembangunan yang hanya mementingkan hasilnya untuk dipersembahkan pada msasyarakat justru mengingkari martabat masyarakat, karena hal tersebut menghambat masyarakat untuk berperan serta dalam proses. Sedangkan intervensi dimaksudkan bahwa dalam pencapaian perubahan sosial dengan pemerataan kesejahteraan bagi semua penduduk tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, karena pemerintah yang menguasai berbagai sumber daya (*strategies for social developments by governments*).

2.2 Kemiskinan

2.2.1 Pengertian

Beberapa ahli yang mendefinisikan kemiskinan hanya dipandang dari segi ekonomi saja antara lain definisi dari World Bank dalam Suryono (2004:100) adalah sebagai ketidakmampuan seorang individu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemiskinan sosial dapat diartikan, sebagai kekurangan jaringan sosial dari struktur sosial yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat,. Kemiskinan politik lebih menekankan pada derajat akses terhadap kekuasaan (*power*), kekuasaan disini berarti mencakup tataran sistem sosial politik yang dapat menentukan alokasi sumber daya untuk kepentingan sekelompok orang atau tatanan sistem sosial yang menentukan

alokasi sumber daya. Menurut Chambers dalam Suryono (2004:100), kemiskinan dianggapnya sebagai proses interaksi dari berbagai faktor yang muncul, sebagai akibat dari situasi ketidakadilan, ketidakpastian, ketimpangan, ketergantungan dalam struktur masyarakat. Oleh karena itu kemiskinan dapat disebut sebagai perangkat kemiskinan yang saling terkait yaitu :

1. Ketidakberdayaan (*powerless*)
2. Kerawanan atau kerentanan (*vulnerability*)
3. Kelemahan fisik (*physical weakness*)
4. Kemiskinan (*poverty*)
5. Isolasi (*isolation*)

Komponen ketidakberdayaan mendorong berlanjutnya proses kemiskinan bagi masyarakat miskin dalam berbagai bentuk, antara lain orang yang tidak berdaya seringkali terlambat mendapat bantuan dari pemerintah dan kecenderungan selalu dirugikan setiap terjadi transaksi jual beli. Faktor kerawanan atau kerentanan ini berkaitan dengan kemiskinan, karena orang terpaksa menjual atau menggadaikan kekayaan dengan kelemahan jasmani.

Kelemahan fisik mendorong seseorang untuk menjadi miskin, karena tingkat produktivitasnya rendah dan tidak mampu menggarap lahan yang luas, dan upah tenaga kerja rendah. Komponen kemiskinan merupakan faktor yang paling menentukan dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain.

Kemiskinan menyebabkan kelemahan jasmani karena kurang makan, yang pada gilirannya mengakibatkan kekurangan gizi, sehingga timbul penyakit dan tidak dapat membiayai pengobatan. Isolasi terjadi karena tempat tinggal mereka yang jauh, pelayanan bantuan pemerintah tidak dapat menjangkau, sebagian besar buta huruf, sehingga menyebabkan mereka jauh dari informasi.

2.2.2 Jenis Kemiskinan

Pada dasarnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kartasmita (1997:10) mengungkapkan bahwa seseorang dikatakan miskin absolut apabila tidak mampu membiayai kebutuhan yang paling minimal untuk dapat hidup sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Kemiskinan relatif adalah perbandingan antara kelompok pendapatan masyarakat, yaitu antara kelompok yang miskin dan kelompok yang tidak miskin, karena mempunyai tingkat pendapatan yang relatif tinggi daripada garis kemiskinan dan merupakan kelompok masyarakat yang relatif lebih maju

2.2.3 Garis Kemiskinan

Menurut Kartasmita (1997:14-15), penyebab kemiskinan adalah empat hal sebagai berikut:

- 1) Rendahnya taraf pendidikan, taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan yang dapat dimasuki.
- 2) Rendahnya derajat kesehatan, taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa. Terjaminnya kesehatan seseorang akan membuat dirinya rajin bekerja sehingga pendapatannya dapat meningkat dan kesejahteraan juga meningkat.
- 3) Terbatasnya lapangan pekerjaan, keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperparah oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan pekerjaan atau kegiatan, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan itu.
- 4) Kondisi keterisoliran, banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati oleh masyarakat lainnya.

Terdapat beberapa faktor penyebab kemiskinan yang secara umum dikemukakan oleh Zadjuli dalam Suyanto (1995:23) adalah sebagai berikut:

1) **Kemiskinan karena faktor alamiah.**

Masyarakat menjadi miskin karena alamnya yang tidak subur serta tidak mempunyai potensi sumber daya alam yang lain. Tanah yang subur bisa menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat. Bila keadaan tanah tandus dan tidak bisa menghasilkan sumber daya alam, maka masyarakat tidak akan punya mata pencaharian. Dengan demikian maka masyarakat tidak akan punya pendapatan yang pada akhirnya akan menjadi miskin.

2) **Kemiskinan dari kolonialisme.**

Masyarakat menjadi miskin karena akibat dari penjajahan yang memeras suatu bangsa dalam waktu yang lama. Dalam kolonialisme, kaum penjajah selalu mengambil kekayaan yang dimiliki oleh negara yang dijajahnya. Penjajahan yang terus menerus dapat menyerap kesejahteraan suatu bangsa.

3) **Kemiskinan karena tradisi.**

Kemiskinan ini terjadi karena adanya budaya setempat yang menentang masuknya arus modernisasi seperti suku Badui di Cibeo, Banten. Tertutupnya suatu wilayah terhadap arus modernisasi yang masuk dapat mengakibatkan wilayah tersebut menjadi terbelakang dalam teknologi. Teknologi yang bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat tidak seharusnya dilarang masuk suatu wilayah, karena mungkin saja teknologi tersebut membawa kesejahteraan.

4) **Kondisi wilayah yang terisolasi.**

Kemiskinan ini terjadi karena lokasi tempat tinggal yang terisolasi dan terpencil, seperti orang Mentawai di kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Keterisoliran juga dapat menyebabkan kemiskinan. Namun dalam hal ini masyarakat dapat berusaha untuk mendapatkan kesejahteraan dengan mempelajari teknologi yang berguna di tempat lain dan dibawa ke wilayahnya.

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

2.3.1 Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari bahasa inggris “empowerment”, yang secara harfiah bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan”, dalam arti pemberian atau.peningkatan “kekuasaan” kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung, demikian yang diungkapkan Jim Ife dalam Huraerah (2008:82).

Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pembangunan digunakan dalam paradig pembangunan yang berpusat pada manusia. Perspektif pembangunan ini menyadari betapa pentingnya kapasitas manusia dalam rangka meningkatkan

kemandirian dan kekuatan internal atas sumberdaya materi dan non-material melalui redistribusi modal atau kepemilikan.

Beberapa ahli yang mengungkapkan definisi pemberdayaan jika dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan yaitu :

- 1) Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
- 2) Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- 3) Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- 4) Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Suharto, 2006 : 58-59)

Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat memberikan kesempatan pada setiap anggota untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan dengan mendapatkan kesempatan yang sama dan menikmati hasil pembangunan tersebut sesuai dengan kemampuannya. Syarat dari keikutsertaan seluruh anggota masyarakat, selain peluang dan akses yang sama, juga menyangkut kemampuan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Oleh karena itu adalah sebuah keharusan memulai konsep pembangunan dengan apa yang dinamakan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya menurut Kartasmita (1997:11-12) dalam Huraerah (2008:87-88) memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi

sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat bertalian erat dengan upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan, seperti halnya pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan.

2.3.2 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Aziz (2005:135) dalam Huraerah (2008:88) merinci tahapan strategi yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya.
- 2) Melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahan tersebut secara partisipatif. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara curah pendapat, membentuk kelompok-kelompok diskusi, dan mengadakan pertemuan warga secara periodic (terus-menerus).
- 3) Menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilah dan memilih setiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan.
- 4) Mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain dengan pendekatan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat.
- 5) Melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.
- 6) Mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk dinilai sejauh mana keberhasilan dan keagalannya.

Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dibutuhkan suatu upaya yang harus dilaksanakan. Kartasamita (200:159) mengemukakan bahwa upaya memberdayakan masyarakat harus dilakukan dengan melalui tiga cara yaitu :

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya karena kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim atau suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut persediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.
- 3) Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlindungan, dan pemihakan kepada yang lemah amat dasar sifatnya.

Upaya pemberdayaan menurut Sumodiningrat (1997:6) dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu ;

- 1) Pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Setiap anggota masyarakat secara alamiah memiliki potensial yang dapat dikembangkan. Itu berarti bahwa setiap anggota masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki menuju kehidupan yang lebih baik.
- 2) Pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam rangka memperkuat potnsi ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.
- 3) Pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat berarti upaya melindungi untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.

Menurut Suharto (1997) dalam Huraerah (2008:89) mengatakan bahwa pelaksanaan proses dalam pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu :

- 1) **Pemungkinan** : menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat cultural dan structural yang menghambat.
- 2) **Penguatan** : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- 3) **Perlindungan** : melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- 4) **Penyokongan** : memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan
- 5) **Pemeliharaan** : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

2.3.3 Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dilaksanakan melalui proses yang terarah dan terus menerus dilaksanakan agar tercipta kemandirian masyarakatnya. Pranarka dalam Prijono (1996) mengemukakan proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara bertahap dalam tiga fase, yaitu :

- 1) **Fase Initial**, semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah, oleh pemerintah, dan diperuntukkan bagi rakyat. Pada fase ini rakyat bersifat pasif melaksanakan apa yang direncanakan pemerintah dan tetap tergantung pada pemerintah.
- 2) **Fase Partisipatoris**, proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat dan diperuntukkan bagi rakyat. Pada fase ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju kemandirian. Kemudian ketika masuk pada fase emansipatoris, peruses pemberdayaan

ini berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan didukung pemerintah bersama masyarakat.

- 3) **Fase Emansipatoris**, ini masyarakat sudah dapat menemukan kekuatan dirinya sehingga dapat melakukan pembaruan dalam mengaktualisasi diri. Puncak dari kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah ketika berada pada fase emansipatoris, untuk dapat merealisasikan hal ini dibutuhkan adanya dua persyaratan pokok, yaitu persyaratan dalam perencanaan pembangunan dan persyaratan dalam pelaksanaan program pembangunan.

Sedangkan Friedman (1992) melihat beberapa tahap pemberdayaan yaitu :

- 1) **Pemberdayaan Individu**, merupakan pemberdayaan keluarga dan setiap anggota keluarga. Asumsinya, apabila setiap anggota keluarga dibangkitkan keberdayaannya, maka unit-unit keluarga berdaya ini akan membangun jaringan keberdayaan yang lebih luas lagi. Jaringan yang luas ini akan membentuk keberdayaan sosial.
- 2) **Pemberdayaan Ikatan Antar Individu/Kelompok**, yang merupakan, “*spiral model*”. Pada hakekatnya individu satu sama lainnya diikat oleh ikatan yang disebut keluarga. Demikian pula antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya, seterusnya hingga ikatan yang lebih tinggi. Pada tingkatan pertama hubungan yang terjadi disebabkan saling percaya satu sama lain, keyakinan agama, kesamaan keturunan, nasib atau kedekatan bertetangga. Pada tingkatan yang lebih tinggi hubungan ini dapat terwujud dalam suatu gerakan buruh, organisasi politik dan lainnya.
- 3) **Pemberdayaan Politik**, pada hakekatnya yang dimaksudkan sebagai lawan dari pengabaian politik (*political exlution*). Pada praktek ekonomi yang terjadi pada saat ini telah ditemukan adanya pengabaian politik dan ekonomi “*urban metropolitan economy*” dan “*multy national economy*” terhadap para orang miskin dipedesaan. Pengabaian ini Nampak pada tidak dimasukkannya si miskin kedalam proses dan struktur akumulasi capital. Pengabaian ini juga Nampak pada pengusuran-pengusuran sumber daya tanah yang dimiliki si miskin di pedesaan oleh sektor-sektor di perkotaan.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun secara kelompok. Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial atau status hirarki lain yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “*senasib*” untuk berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang efektif atau biasa disebut “*collective self-empowerment*” atau kolektif pemberdayaan diri. Dalam kelompok terjadi suatu dialogical encounter

yang menumbuhkan identitas seragam dan mengenali kepentingan mereka bersama.

Dalam proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Pendapat tentang pentahapan pemberdayaan tersebut adalah seperti yang diungkapkan oleh Sulistyani (2004), tahap-tahap yang harus dilewati dalam pemberdayaan adalah :

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pelaku pemberdayaan menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan membuka keinginan dan kesadaran masyarakat akan kondisinya saat ini, dan dengan demikian dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat menggali peran dalam pembangunan. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-kecakapan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan dan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Tahap ini merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi dalam lingkungannya.

2.3.4 Indikator Pemberdayaan

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui beberapa indikator pemberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika suatu program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja

dari sarana perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

Schuler, Hashemi dan Riley dalam Suharto (2004:63) mengembangkan delapan

indikator pemberdayaan, yaitu :

- 1) Kebebasan mobilitas : kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- 2) Kemampuan membeli komoditas kecil : kemampuan individu untuk membeli barang-banrang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak goreng, sabun, minyak tanah dan lain-lain). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutamajika ia dapat membuat keputusan sendiri dan tanpa meminta izin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut menggunakan uangnya sendiri.
- 3) Kemampuan membeli komoditas besar : kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, Koran, pakaian keluarga. Seperti halnya indicator diatas, poin tinggi diberikan kepada individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut menggunakan uangnya sendiri.
- 4) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga : mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, memperoleh kredit usaha.
- 5) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga : responden ditannya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan, dari dia tanpa meminta izinnya, ;yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja diluar rumah.
- 6) Kesadaran hukum dan politik : mengetahui salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- 7) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes : seseorang dianggap "berdaya" jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah
- 8) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga : memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut atau terpisah dari pasangannya.

Menurut Kieffer dalam Suharto (1997:215) pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, kompetensi partisipatif. Parson et.al dalam Suharto (2006:63) juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada :

- 1) Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
- 2) Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- 3) Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

2.3.5 Tingkatan Keberdayaan Masyarakat

Sudah saatnya paradigma pembangunan yang selalu menempatkan pemerintah sebagai sumber dari segala-galanya digeser dengan menempatkan masyarakat sebagai pemain utama. Kekuasaan yang sejatinya dikembalikan kepada masyarakat, agar masyarakat menjadi aktor utama dalam pembangunan. Sebuah proses yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan derajat keberdayaan masyarakat sampai kepada tingkat keberdayaan masyarakat yang optimal.

Secara bertingkat, keberdayaan masyarakat menurut Susiladiharti (2002) dalam Huraerah (2008:90) dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Tingkat keberdayaan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*).
- 2) Tingkat keberdayaan kedua adalah penguasaan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan.
- 3) Tingkat keberdayaan yang ketiga adalah dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri dilingkungannya.

- 4) Tingkat keberdayaan keempat adalah kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.
- 5) Tingkat keberdayaan yang kelima adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Tingkatan ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintahan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan derajat keberdayaan masyarakat tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah secara runtun dan simultan, antara lain :

- 1) Meningkatkan suplai kebutuhan-kebutuhan bagi kelompok masyarakat yang paling tidak berdaya (miskin).
- 2) Upaya penyadaran untuk memahami diri : potensi, kekuatan dan kelemahan serta memahami lingkungannya.
- 3) Pembentukan dan penguatan institusi, terutama institusi di tingkat lokal.
- 4) Upaya penguatan kebijakan.
- 5) Pembentukan dan pengembangan usaha/kerja.

Dubois dan Miley dalam Suharto (2006:68) member beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat :

- 1) Membangun relasi pertolongan yang merefleksikan respon empati, menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri, menghargai perbedaan dan keunikan individu, menekankan kerjasama klien.
- 2) Membangun komunikasi yang menghormati martabat dan harga diri klien, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien, menjaga rahasia klien.
- 3) Terlibat dalam pemecahan masalah yang memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak klien, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar, melibatkan klien dalam pembuatan kebijakan dan evaluasi.

- 4) Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui ketaatan terhadap kode etik profesi, keterlibatan dalam pengembangan profesional, penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi kedalam isu-isu public, penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan,

2.3.6 Permasalahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang (2006) menyebutkan beberapa kendala utama pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan yaitu :

- 1) Rendahnya tingkat pendidikan SDM
- 2) Metodologi yang diterapkan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat
- 3) Kelembagaan masyarakat yang mulai pudar dan kelembagaan pendampingan yang lebih banyak dikalahkan oleh keinginan organisasi
- 4) Kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat

Menurut Kiswondo dalam Nur'aini (2005) mengemukakan ada dua kendala utama yang ditemui dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu :

- 1) **Problemic Cultural**, disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga menimbulkan masalah cultural, seperti etos kerja yang rendah dan adat istiadat yang tidak mendukung
- 2) **Problemic Structural**, disebabkan oleh adanya kebijakan pembangunan yang kurang mendukung proses pemberdayaan masyarakat seperti penyediaan permodalan, teknologi dan pasar

Ada tiga kendala utama dalam upaya memberdayakan rakyat desa miskin agar dapat dientaskan dari lembah kemiskinan, kendala tersebut adalah kendala yang bersifat fisik alamiah, struktural-kultural, dan sistemik (Mubyarto dkk : 1994)

Kendala fisik alamiah adalah rintangan-rintangan yang bersifat fisik yang sudah "terwarisi" pada suatu daerah tertentu seperti keadaan tanah yang kering, berbukit-bukit, dan sulit air. Untuk mengatasi permasalahan yang seperti ini sebenarnya relatif mudah, karena yang dibutuhkan adalah teknologi, dan itu

berarti dana. Akan tetapi pemberian dana atau teknologi pasti tidak menyelesaikan segala-galanya, sebab sebelum dan setelah pemberian dana tentu ada persoalan-persoalan yang bersifat non-fisik (sosio-kultural) yang tidak sederhana bentuk dan cara penyelesaiannya. Persoalan-persoalan semacam itulah yang pasti akan muncul yang dipat dikatakan mempunyai sifat structural-kultural.

Dimensi struktural dari kemiskinan diartikan suasana kemiskinan yang bersumber terutama dari struktur sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat (Alfian, 1980) sedangkan dimensi kultural adalah suasana dan sikap pasrah (menerima nasib) dari sekelompok masyarakat kerana terjerat berbagai macam kekurangan sehingga mereka tampak tidak mempunyai inisiatif dan tidak mempunyai gairah.

2.3.7 Evaluasi Program Pemberdayaan

Evaluasi adalah kegiatan menilai secara keseluruhan apakah sebuah kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana atau ketentuan yang telah disusun sebelumnya. Evaluasi adalah mengukur berhasil tidaknya program yang telah dilaksanakan, apa sebabnya berhasil dan apa sebabnya gagal, serta bagaimana tindak lanjutnya. Evaluasi biasanya dilakukan pada akhir suatu kegiatan (Huraerah, 2008 :71).

Evaluasi program pemberdayaan membutuhkan metode yang bisa secara fleksibel digunakan selama proses evaluasi berlangsung. Fokus pelaksanaan evaluasi dapat mencakup keseluruhan dimensi program pemberdayaan, yaitu evaluasi aturan main yang normative dan evaluasi hasil (*outcome*) proyek yang riil. Komparasi kedua jenis program bisa menjawab sejauh mana konsistensi logis

aturan main program pemberdayaan dalam mewujudkan partisipasi menuju pemberdayaan masyarakat.

Didalam proses normatif dapat ditanyakan konsistensi logis antara tujuan dan latar belakang program, sasaran/pemanfaat, lokasi, pendekatan dan prinsip pengelolaan (kebijaksanaan), organisasi pelaksanaan, mekanisme perencanaan, pelaksanaan, kegiatan pasca pelaksanaan, pengendalian, pembinaan, pengorganisasian, pelaporan, evaluasi, penyebaran informasi, pengawasan, sumber dana, alokasi dana, penyaluran dana. Sedangkan evaluasi terhadap hasil (*outcome*) program berguna untuk memperlihatkan sampai mana fakta empirik sesuai dengan kaidah normatif dalam rangka mendorong partisipasi pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.3.7
Perbandingan evaluasi konvensional dan partisipatif

Aspek	Konvensional	Partisipatif
Siapa pelaku evaluasi?	Para ahli, akademisi atau ilmuwan.	Masyarakat
Apa yang di evaluasi?	Aspek dan indikator evaluasi disusun sendiri terlebih dahulu oleh para ahli di belakan meja	Masyarakat memilih sendiri apa saja yang perlu di evaluasi beserta indikatornya
Bagaimana caranya?	Terpusat pada objektivitas ilmiah dengan metode-metode yang canggih	Evaluasi sendiri dengan cara yang sederhana sesuai dengan kondisi masyarakat
Kapan?	Biasanya selama dan setelah pelaksanaan	Setiap tahapan program dalam skala kecil
Alasan?	Lebih sebagai bentuk pertanggungjawaban akademis atau pertanggungjawaban program	Selain bentuk pertanggungjawaban, juga bertujuan memberdayakan penduduk setempat

Sumber : Handono, dkk. (2005) dalam Huraerah (2008:72)

Evaluasi yang mengaitkan tujuan dan hasil program secara sistematis dan reflektif memiliki keunggulan untuk menunjukkan kedalaman permasalahan

program. Dengan strategi semacam ini dibuka peluang pemecahan permasalahan program secara mendasar. Evaluasi konseptual maupun praktis ini membuka peluang perbaikan perencanaan dan peramalan program. Perbaikan terhadap aturan main bermakna sebagai perbaikan struktur program yang diharapkan memperbaiki struktur normatif dan sistem nilai masyarakat kearah pemberdayaan. Sedangkan perbaikan terhadap praktek program bermakna sebagai perbaikan organisasi program, untuk menunjukkan jalan atau lembaga yang lebih konkrit dalam mencapai struktur diatas. Tanpa perbaikan struktur program, maka tahapan pelaksanaan program beresiko menuju tindakan ritualistic (sekedar dikerjakan) tetapi tidak membawa kepada makna pemberdayaan yang hakiki. Sementara tanpa perbaikan organisasi pelaksanaan program akan jatuh pada pengasingan tindakan dan sifat-sifat pemberdayaan (Agusta, 2002 : 8-10).

2.4 Kelompok

2.4.1 Pengertian Kelompok

Banyak pengertian yang diberikan terhadap apa yang dimaksud dengan kelompok. Untuk memberikan arah atau pemahaman yang lebih tegas terhadap apa yang dimaksud dengan kelompok perlu kiranya dipaparkan beberapa definisi tentang kelompok. Kelompok sering juga disebut dengan kelompok sosial. Kelompok bukanlah sekedar kumpulan orang-orang yang tidak mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya, namun kelompok mempunyai ikatan yang cukup kuat diantara sesama anggotanya. Soekanto (1990) mempertanyakan apakah setiap himpunan manusia dapat dikatakan sebagai kelompok?

Terkait dengan itu, menurut Humans (1950) dan Bonner (1953), kelompok adalah sejumlah orang-orang yang saling melakukan interaksi. Dalam pengertian ini orang yang terhimpun dalam kelompok tersebut saling berinteraksi satu sama lain, jadi bukan hanya kumpulan orang-orang semata. Hal senada juga dikatakan oleh Hiver dan Page (Mardikanto, 1992) yang mengatakan bahwa kelompok adalah himpunan kesatuan manusia yang hidup bersama sehingga terdapat hubungan timbal balik dan saling pengaruh mempengaruhi serta memiliki kesadaran untuk saling tolong menolong. Menurut Levin (1951) dan Cartwright (1968) kelompok adalah kumpulan manusia, dua orang atau lebih yang menunjukkan saling ketergantungan dengan pola interaksi yang nyata.

Kemudian Slamet (2001) memberikan pengertian yang lebih tegas terhadap kelompok yang mengatakan dua atau lebih orang yang berhimpun atas dasar kesamaan, berinteraksi melalui pola/struktur tertentu guna mencapai tujuan bersama, dan dalam kurun waktu yang relatif panjang. Kesamaan-kesamaan tersebut harus menjadi landasan utama sehingga kelompok dapat berfungsi dengan baik. Hendropuspito (1989) mengatakan kelompok sebagai kelompok sosial adalah sejumlah orang yang saling berhubungan secara teratur.

Dalam penjelasan lebih lanjut dikatakan bahwa kelompok sosial adalah suatu kumpulan yang nyata, teratur dan tetap dari orang-orang yang melaksanakan peranan yang saling berkaitan guna mencapai tujuan bersama. Dari pengertian yang dikemukakan diatas, kita dapat melihat bahwa kelompok terdiri dari dua orang atau lebih, terjadi interaksi yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya

berdasarkan pola struktur yang ada, dan adanya kesamaan kesamaan yang menjadi landasan dalam berinteraksi.

Kemudian Sheriff (1964), melihat bahwa kelompok sebagai suatu unit sosial yang terdiri dari sejumlah individu, dimana satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang saling bergantung sesuai dengan peranan (*role*) dan kedudukannya (*status*), yang secara eksplisit maupun implisit mempunyai norma yang mengatur segala tingkah laku anggota dari kelompok tersebut. Dimana kelompok dan norma yang ada mempunyai hubungan yang erat dengan kesamaan sikap, kesamaan perasaan dan kesamaan tujuan. Senada dengan ini Gerungan (1981), mengatakan bahwa kelompok merupakan kesatuan sosial yang terdiri atas dua atau lebih individu yang mengadakan interaksi sosial cukup intensif dan teratur, sehingga diantara individu terdapat pembagian tugas, struktur dan norma-norma tertentu yang khas bagi kesatuan sosial tersebut.

Dari pengertian-pengertian diatas sangat jelas apa yang dimaksud kelompok. Secara singkat dapat dikatakan bahwa kelompok adalah kumpulan dari individu-individu yang memiliki kesamaan dan saling berinteraksi satu sama lain dalam waktu yang relatif singkat melalui suatu pola peranan dan pembagian tugas yang sudah terstruktur dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya perlu dipaparkan perbedaan antara kelompok dengan komunitas karena kedua konsep ini mempunyai arti yang cukup penting dalam proses pemberdayaan tersebut. Apakah KUBE termasuk kelompok atau komunitas. Mana diantara elemen ini yang sesungguhnya layak diberdayakan, apakah

kelompok atau komunitas, atau kedua-duanya merupakan elemen yang patut diberdayakan. Menurut Lawang (2005) komunitas adalah

“Bilamana suatu kelompok didefinisikan secara territorial, seperti desa merupakan suatu kelompok fungsional untuk semua anggotanya, dan apabila hal itu memperlihatkan sesuatu dimensi yang sungguh-sungguh berpengaruh, maka dinamakan komunitas.”

Jadi perbedaan yang hakiki dari kedua konsep ini adalah bahwa komunitas menggunakan batas territorial yang jelas dan warganya hidup dalam waktu yang cukup lama bahkan permanen, misalnya desa atau RT atau RW. Sedangkan kelompok yang tidak mengenal batas territorial seperti halnya komunitas, anggotanya dapat berasal darimana saja dan hidup untuk jangka waktu yang terbatas. Bila tujuannya sudah tercapai biasanya kelompok ini bubar.

2.4.2 Jenis-jenis kelompok.

Ada berbagai jenis kelompok dan tipe kelompok yang ada dalam masyarakat. Secara umum jenis dan tipe kelompok ini digolongkan sebagai berikut, Slamet (2001) :

1. **Berdasarkan pada Struktur Kelompok.** Didasarkan pada struktur kelompok, kelompok dibedakan atas kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal mempunyai tujuan yang jelas, yang disepakati bersama dan dirumuskan secara tertulis. Mempunyai aturan atau norma yang tertulis yang dapat di pedomani dan dijadikan acuan dalam bertindak oleh anggota kelompok. Keanggotaan bersifat resmi dan adanya pembagian tugas dan peranan yang jelas dari masing-masing anggota. Sedangkan kelompok informal merupakan kebalikan dari criteria kelompok formal.
2. **Berdasarkan Fungsi Kelompok.** Didasarkan pada fungsi kelompok, kelompok dibedakan menjadi dua yaitu, kelompok sosial dan kelompok tugas. Kelompok sosial adalah kelompok dimana anggota-anggotanya lebih menekankan pada kesenangan dan kepuasan anggota, seperti kelompok wisata atau kelompok turis. Kelompok ini tidak berupaya meraih suatu prestasi dalam pencapaian suatu karier tetapi bagaimana suatu kegiatan dapat memuaskan anggota. Sedangkan kelompok yang didasarkan pada tugas adalah kelompok yang lebih berorientasi pada

tugas-tugas yang harus diselesaikan. Segala sesuatu yang dilakukan harus berorientasi pada penyelesaian tugas-tugas kelompok. Tugas merupakan hal yang diutamakan, sehingga pembagian tugas merupakan hal yang penting di dalam kelompok ini. Perbedaan kelompok sosial dan kelompok tugas

3. **Berdasarkan Pada Pola Interaksi dalam Kelompok.** Pembagian kelompok yang didasarkan pada pola interaksi adalah sebagai berikut
 - a. *Interacting group* merupakan kelompok kerjasama dimana pencapaian tujuannya menuntut kerjasama yang baik diantara anggota-anggotanya, misalnya tim sepak bola
 - b. *Co-acting group*, merupakan kelompok bersama, dimana tujuan kelompok dapat dicapai bilamana masing-masing anggota melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai peran yang ditetapkan, namun pelaksanaan tugas diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan kelompok, misalnya kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat termasuk didalamnya KUBE.
 - c. *Counter-acting group*, adalah kelompok dimana anggotanya memiliki tujuan yang berbeda atau berlawanan untuk mencapai tujuan bersama, misalnya klub olahraga tinju

